

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini persaingan di dunia perbankan yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia dan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih bank. Semakin tinggi persaingan akan mempengaruhi pengelolaan bank dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya dan tingginya persaingan akan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank. Untuk menghadapi persaingan bank harus dapat menjaga kinerjanya. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor penting untuk menilai pencapaian yang telah dicapai melalui berbagai aktivitas untuk meninjau suatu perusahaan telah melaksanakan pengelolaan secara baik. Bank yang kinerjanya buruk akan sulit mendapatkan dana dan sulitnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Penurunan kinerja bank dalam skala nasional juga pernah terjadi pada saat krisis pada tahun 1997-1998. Menurut laporan World Bank, penurunan kinerja perbankan saat itu disebabkan oleh manajemen bank yang tidak baik, banyaknya kredit bermasalah, turunnya permodalan bank, dan turunnya kepercayaan masyarakat karena likuiditas bank. Kesulitan likuiditas pada saat itu makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana secara besar-besaran. Adanya krisis tersebut menyebabkan kerugian yang dialami oleh bank dan mengakibatkan kebangkrutan. Pada saat itu juga banyak bank yang mengalami kekurangan modal dikarenakan banyak nasabah yang menarik dana nya dan membuat mereka tidak percaya untuk menyimpan uang di bank. *Good corporate governance* menjadi solusi untuk menghadapi krisis keuangan yang terjadi. *Good corporate governance* merupakan salah satu elemen dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan antara pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan Dyah & Dul (2011). *Good Corporate Governance* juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghadapi persaingan era globalisasi sehingga perusahaan khususnya

Perbankan Indonesia tidak tertindas dalam era globalisasi dan persaingan bebas Totok (2010). Pada 9 Januari 2004, BI mengimplementasikan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan tujuan melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional dan membangun kembali perekonomian Indonesia. Visi API adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien agar dapat menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Isu corporate governance menjadi perhatian para pengamat ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah kondisi dunia usaha di Indonesia tidak mendukung terciptanya iklim perekonomian yang baik. Penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, salah satunya Indonesia yaitu mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of director) dan komite audit (audit committee) di perusahaan tak berfungsi efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham. Komite audit merupakan komite yang cukup penting dalam perusahaan, memiliki peran penting bagi kemajuan perusahaan. Dengan adanya komite audit dapat meningkatkan kualitas pengawasan pada perusahaan yang mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pemegang saham. Komite audit ini membantu dewan komisaris serta untuk mewujudkan perusahaan yang *Good Corporate Governance*.

Dalam Penelitian Ekonomi Madya Bank Indonesia yang diterbitkan dalam situs resmi BI tanggal 26 November 2009 mengenai menghadapi krisis global tahun 2008 pada kasus Bank Century yang kerugiannya mencapai Rp6,7 triliun yang relatif tidak menimbulkan guncangan di pasar keuangan, menjadi sebuah keberhasilan otoritas dalam meredam gejolak lebih lanjut dari dampak krisis. Tetapi penanganan kasus tersebut masih menjadi persoalan hingga saat ini dalam perbaikan di bidang investasi. Belum banyak investor yang mau memberikan komitmennya dalam jangka panjang. Di sisi lain, kasus Bank Century menuntut penyelesaian yang tepat dan adil. Permasalahan hukum harus diproses dengan tegas, sementara permasalahan teknis perbankan harus diselesaikan dengan mekanisme perbankan (Herdiawan, 2009)

Dalam berita yang diterbitkan Tempo.co pada tahun 2019 terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh Yocie Gusman selaku direktur utama Bank Jabar Banten Syariah dan Yasril Narapraya selaku Grup Head Ritel Bank BJB Syariah. Mencairkan kredit fiktif untuk dua perusahaan PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 548 miliar. Dana tersebut dicairkan Bank BJB Syariah kepada dua perusahaan itu untuk pembiayaan pembangunan Garut Super Blok di Garut tahun 2014-2015.

Menurut Helfert (2008) dalam Wuryanti (2015:81) Kinerja keuangan adalah suatu hasil, prestasi atau keadaan yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Sucipto (2003, hlm.34) dalam Saraswati,dkk (2013) Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja keuangan. Laporan laba rugi merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk satu periode tertentu. Angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi sering dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Arus kas (Cash Flow) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima perusahaan dan dibebani oleh beban yang bersifat tunai serta benar-benar yang sudah dikeluarkan perusahaan. Harahap (2011:121) mengungkapkan Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menjadi acuan investor dalam membeli saham. Pemilik perusahaan, manajer, kreditor, investor, dan pemerintah berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan sebagai penyedia informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*),

akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*indenpedency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip GCG berkaitan dengan bagaimana usaha perbankan dikelola. Hal ini diwujudkan dengan serangkaian hubungan antara manajemen bank, dewan direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya (Hennie dan Sonja, 2011: 37). Menurut World Bank Reports (2012), krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN dan menyebabkan penurunan kinerja keuangan perusahaan terjadi karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Kegagalan penerapan GCG ini berasal dari sistem kerangka hukum yang masih lemah, kurangnya pengawasan dari dewan komisaris dan auditor, dan juga pelaksanaan perbankan yang buruk sehingga masyarakat kehilangan rasa kepercayaan terhadap bank (Aprianingsih, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan Tisna dan Agustami (2016) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* Berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Hidayat (2015) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan

Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi keputusan manajer dan akan berpengaruh pada kinerja keuangan. Menurut Brigham dan Hartono (2010:4), ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan, akan semakin mudah perusahaan mendapatkan investor dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada umumnya total aset dijadikan dasar untuk mengukur besarnya perusahaan karena memiliki sifat yang jangka panjang. Menurut Indarti dan Extralyus (2013) menyatakan “Perusahaan besar pada dasarnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi disisi lain perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar” Sehingga dapat bahwa disimpulkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Menurut Putra (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian Aprianingsih dan Yushita (2016) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015), Setyawan (2019) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar pada di BEI Tahun 2015-2019).

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dapat dihasilkan dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
5. Apakah Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian berdasarkan perumusan masalah yaitu mendapatkan suatu bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk melakukan pengembangan penelitian dan menambah pengetahuan, terutama mengenai ukuran perusahaan, dan peran *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan.
2. Bagi Regulator
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan tambahan pemikiran dalam menyajikan laporan keuangan dan diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai pertimbangan dan dasar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan bagi perusahaan sektor perbankan.
3. Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada investor untuk mempertimbangkan risiko keuangan sehingga dapat melakukan valuasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.